

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

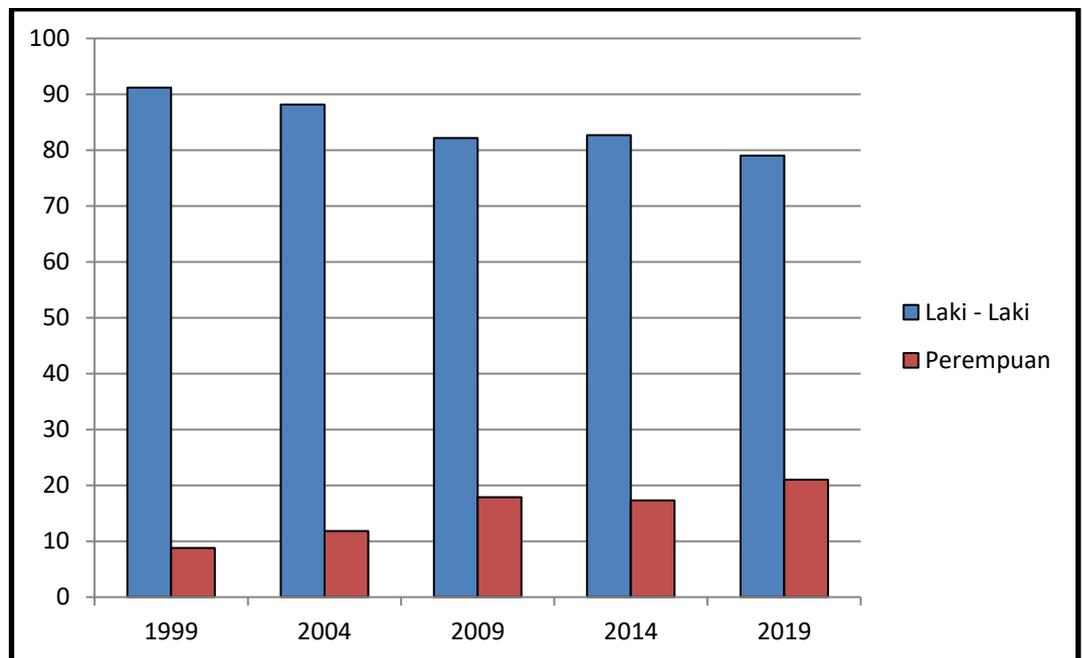
### **1.1. Latar Belakang**

Dunia politik dalam mata masyarakat dikenal sebagai dunia kotor yang penuh dengan kebohongan, kejahatan, dan semacamnya yang kemudian melahirkan stigma dalam masyarakat. Stigma tersebut lahir dikarenakan adanya stereotipe gender yang mengatakan bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih lemah dibandingkan kaum laki – laki. Kemudian stigma tersebut berpengaruh kepada jumlah masyarakat yang terjun ke dalam dunia politik, khususnya perempuan. Perbandingan antara perempuan dan laki – laki yang terjun ke dunia politik di Indonesia terbilang masih cukup jauh. Stigma yang sudah tertanam di masyarakat mengenai dunia politik berpengaruh terhadap perempuan. Pada dasarnya, perempuan di mata masyarakat dilihat sebagai sosok atau makhluk yang memiliki sifat lemah lembut dan keibuan, sehingga sering kali perempuan dipandang sebelah mata oleh masyarakat khususnya jika perempuan terjun ke dalam dunia politik. Karena stigma masyarakat mengenai dunia politik bertolak belakang dengan stigma masyarakat mengenai sosok perempuan.

Jika dilihat dari sejarahnya, sudah banyak tokoh perempuan yang kerap kali menyuarakan agar perempuan mendapatkan hak yang sama seperti laki – laki, tidak hanya di bidang politik namun di bidang lainnya. Pemerintah juga ikut turun untuk berupaya agar perempuan dapat berperan lebih aktif di dunia politik. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menerbitkan beberapa peraturan perundang – undangan. Beberapa peraturan perundang – undangan tersebut yaitu UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada ketiga peraturan perundang – undangan tersebut menjelaskan agar menyertakan keterlibatan perempuan paling rendah sebanyak 30% pada aktifitas

politik. Dengan adanya peraturan perundang – undangan tersebut, diharapkan terjadi peningkatan keterwakilan perempuan di kursi parlemen Indonesia.

Sosok perempuan memiliki karakteristik yang sangat dibutuhkan di dalam dunia politik, oleh karena itu dunia politik sangat membutuhkan sosok perempuan yang dipercaya dapat menghadapi situasi kritis. Persepsi dunia politik tidak cocok untuk perempuan dipatahkan saat Ibu Megawati Soekarno Putri dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Sejak saat itu, jumlah perempuan yang masuk ke dalam dunia politik mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi baik dalam pemerintahan daerah maupun parlemen. Tercatat peningkatan jumlah perempuan dalam anggota DPR RI yang terpilih. Pada periode 2014 -2019 tercatat sebanyak 17 persen anggota DPR adalah perempuan. Kemudian persentase tersebut meningkat pada periode 2019 – 2024 menjadi sekitar 21 persen dari anggota DPR adalah perempuan. ( dilansir pada <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30494/t/Ketua+DPR:+Perempuan+Butuh+Berpolitik,+Politik+Butuh+Perempuan> pada 20 Desember pukul 19.12 WIB)



**Gambar 1.1. Jumlah Anggota DPR Periode 1999 – 2019**

Sumber: Statistik Indonesia di rilis pada tanggal 29 April 2020.

Jika dilihat dari tabel data statistic diatas, jumlah anggota laki – laki dalam DPR RI masih tetap mendominasi dibandingkan jumlah anggota perempuan. Namun,

persentase jumlah anggota perempuan dalam DPR RI cenderung mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Ini menandakan bahwa perempuan di Indonesia sudah mulai aktif untuk ikut turun di dalam dunia politik Indonesia. Partisipasi perempuan pada dunia politik disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 1) kuota 30% untuk calon anggota perempuan, 2) sektor pendidikan yang memberikan peluang bagi perempuan agar dapat lebih maju sehingga banyak diantara mereka yang berpertasi dengan gelar cumlaude di beberapa universitas ternama di Indonesia, 3) adanya kemajuan teknologi yang mempermudah mereka untuk mengakses informasi untuk memperoleh pengetahuan dan melatih keterampilan (Cangara, 2016).

Pemimpin selalu di kaitkan dengan sosok laki – laki. Dikarenakan laki –laki selalu dijadikan pemimpin dalam rumah tangga, sehingga sosok lelaki kerap kali di kaitkan juga dengan jabatan pemimpin dari setiap organisasi baik itu adalah organisasi yang skalanya besar seperti pemerintahan, partai politik, parlemen dan sebagainya hingga organisasi yang berskala kecil seperti organisasi – organisasi yang ada di sekolah maupun di universitas. Selain itu, sosok lelaki juga di pandang sebagai sosok yang berwibawa dan tegas saat memimpin suatu organisasi. Sosok perempuan sebenarnya tidak kalah untuk menjadi seorang pemimpin seperti sosok laki –laki. Namun, karena masih adanya stigma mengenai karakteristik perempuan yang lemah lebut menjadikan seorang perempuan menjadi kurang percaya diri.

Dalam penelitian (Putri, 2015), pada dasarnya perempuan dan laki –laki memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan aktivitas komunikasi politik. Partai pun tidak membedakan antara perempuan dan laki – laki dalam bertugas, namun perempuan sendiri yang membedakan diri mereka dengan laki – laki di lingkungan partai tersebut. Kurangnya kepercayaan publik terhadap perempuan menjadi hambatan perempuan dalam melakukan aktivitas politik. Sehingga, perempuan mulai membatasi dirinya sendiri dan akhirnya hal tersebut menjadi pembeda dari pembagian kerja antara laki – laki dan perempuan.

Seiring dengan berjalannya waktu, dengan jumlah perempuan dalam dunia politik yang meningkat dapat membuka peluang bagi perempuan dalam menempati jabatan pemimpin dalam dunia politik. Semakin banyaknya perempuan dengan latar pendidikan yang baik, menjadikan perempuan tidak kalah dengan laki – laki di mata masyarakat. Dalam penelitian (Kirwanto, 2018), subjek penelitian dikatakan layak

dijadikan panutan dikarenakan ia memiliki karakter kepribadian yang baik sebagai seorang pemimpin perempuan. Bagi para anggotanya, mereka tidak menganggap beliau sebagai seorang pemimpin perempuan yang memiliki sifat yang lemah, melainkan tegas dan selalu membantu dalam meningkatkan kinerja anggotanya.

Seorang pemimpin merupakan seseorang yang memiliki pengaruh dan wewenang untuk mempengaruhi khalayak. Sehingga, seorang pemimpin sering kali disebut sebagai komunikator politik dalam melakukan aktivitas komunikasi politik. Aktivitas komunikasi politik merupakan kegiatan yang sangat sering dilakukan oleh seorang komunikator politik dengan tujuan tertentu. Aktivitas komunikasi tersebut dapat berupa retorika, agitasi politik, propaganda politi, dan lobi politik (Arifin, 2011).

Provinsi Nusa Tenggara Barat juga tidak luput oleh kepemimpinan seorang perempuan. Pada pilkada tahun 2018 lalu, terjadi peningkatan pada kepemimpinan perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun tersebut sejumlah figure perempuan seperti Siti Rohmi Djalilah yang merupakan mantan Ketua DPRD Lombok timur dan sekarang berhasil menjabat sebagai Wakil Ketua Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2018 – 2023. Selain itu, bebarapa figur perempuan yang ikut bertarung pada Pilkada 2018 adalah Selly Handayani dan Lale Yaquttunafis (dilansir pada laman: <https://radarlombok.co.id/pilkada-2018-dianggap-kebangkitan-kepemimpinan-perempuan.html> pada 02 Mei pukul 12.14 WITA). Dari hasil data peningkatan jumlah perempuan dalam DPR RI dan mulai meningkatnya figur pemimpin perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terlihat juga peningkatan dalam DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dipimpin oleh seorang pemimpin perempuan dalam dua periode terakhir ini yaitu Ibu Baiq Isvie Rupaeda. Ibu Isvie merupakan salah satu tokoh perempuan yang berhasil mematahkan stigma masyarakat mengenai pemimpin perempuan.

Dalam mematahkan stigma yang telah melekat pada masyarakat tersebut, Beliau menempuh jalan yang cukup panjang dan juga tidak mudah untuk seorang perempuan yang kerap kali dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Ibu Isvie memulai karirnya dalam dunia politik pada tahun 1988. Sebelum memasuki dunia politik, beliau menjadi seorang dosen jurusan hukum di Universitas Mataram. Kemudian beliau melepas gelar dosennya tersebut dan mulai memasuki dunia politik

dengan memutuskan untuk bergabung dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) yang merupakan salah satu bagian dari partai Golongan Karya.

Ibu Isvie memiliki kepedulian yang lebih terhadap kecilnya kesempatan yang diberikan untuk seorang perempuan dalam melakukan kegiatan politik. Dengan kepeduliannya tersebut, beliau diberikan kepercayaan untuk diberikan jabatan sebagai anggota MPR RI pada periode 1999 – 2004. Setelah menunaikan tugasnya sebagai anggota MPR RI tersebut, beliau mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada pemilu 2004, namun gagal. Beliau kemudian kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada pemilu 2009, namun masih gagal. Kegagalannya tersebut tidak membuat beliau patah semangat untuk mencoba kembali. Setelah melihat peluang pada pemilu 2014, beliau mencalonkan diri kembali dan usaha beliau berhasil yang mengantarkan beliau menjadi anggota DPRD Provinsi NTB periode 2014 – 2019. Dalam ketiga pemilu tersebut, beliau mencalonkan diri melalui Partai Golongan Karya.

Pada tahun 2016, beliau diberi kepercayaan kembali untuk menggantikan rekannya yang berada di satu partai dengan beliau yaitu, Umar Said sebagai ketua DPRD Provinsi NTB. Sejak saat itu, beliau tercatat sebagai seorang politikus perempuan pertama yang berhasil menduduki jabatan sebagai ketua pada sejarah kepemimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ibu Isvie menjalankan jabatan tersebut hingga masa akhir periode jabatan tersebut selesai yaitu pada tahun 2019. Kemudian, pada tahun 2019 beliau kembali dipercaya oleh Partai Golkar untuk memimpin DPRD Provinsi NTB periode 2019 – 2024, dengan dilantikannya kembali beliau sebagai ketua DPRD Provinsi NTB menjadikan beliau sebagai salah satu ketua DPRD Provinsi perempuan pada periode 2019 – 2024.

Berdasarkan beberapa data yang dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa stigma yang melekat pada masyarakat tentang dunia politik dan perempuan menyebabkan kurangnya partisipasi perempuan pada dunia politik. Hal ini dikarenakan adanya rasa kurang percaya dari masyarakat terhadap perempuan khususnya sebagai pemimpin. Stigma yang ada dalam masyarakat tersebut tidak mematahkan semangat Ibu Isvie selaku ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akhirnya berhasil untuk menduduki jabatan beliau saat ini. Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai peran Ibu

Baiq Isvie Rupaeda selaku seorang pemimpin perempuan dalam melakukan aktivitas komunikasi politik pada organisasi politik yang beliau pimpin melalui penelitian ini dengan judul “Peran Perempuan Sebagai Pemimpin Dalam Aktivitas Komunikasi Politik (Studi Tokoh Pada Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat)”

## **1.2. Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada bagaimana peran perempuan sebagai pemimpin dalam melakukan aktivitas komunikasi politik (Studi Tokoh Pada Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat)

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui dan menganalisis serta menjelaskan bagaimana peran perempuan sebagai pemimpin dalam melakukan aktivitas komunikasi politik.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, memperdalam pengetahuan yang berhubungan dan berkaitan dengan studi ilmu komunikasi khususnya komunikasi politik dan pengembangan mengenai proses komunikasi seorang pemimpin perempuan dalam dunia politik.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana peran sosok perempuan dalam menjadi seorang pemimpin melakukan aktivitas politik dengan baik sehingga dapat mematahkan stigma masyarakat yang memandang sosok perempuan tidak cocok untuk menjadi seorang pemimpin.

## **1.5. Waktu dan Periode Penelitian**

Adapun penelitian sampai penyusunan penelitian yang di lakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1. Waktu dan Periode Penelitian**

No	Kegiatan	2020 – 2021								
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst
1.	Penyusunan proposal skripsi bab 1 sampai 3									
2.	Pendaftaran Desk Evaluation									
3.	Proses pencarian data ke lapangan									
4.	Proses pengolahan dan penyajian data									
5.	Penyusunan bab 4 dan 5									
6.	Bimbingan dan revisi bab 4 dan 5									
7.	Sidang skripsi									